

Desika Handayani¹, Qolbi Khorir²

UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu^{1, 2}

e-mail: desikahandayani06@gmail.com¹, qolbikhori@gmail.com²

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dinamika perubahan pendidikan Islam di Indonesia selama masa Orde Baru, khususnya dalam konteks posisi dan pengakuannya dalam sistem pendidikan nasional. Sebelum Orde Baru, lembaga pendidikan Islam seperti pesantren dan madrasah berada di posisi pinggiran dan belum diakui secara penuh, sehingga minat masyarakat terhadap pendidikan Islam relatif rendah. Dengan pendekatan deskriptif naratif, penelitian ini menganalisis bagaimana kebijakan pemerintah Orde Baru mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan institusi pendidikan Islam. Selama masa tersebut, pendidikan Islam berkembang di bawah kontrol ketat dan tekanan ideologis, sehingga harus melakukan berbagai konsesi terhadap sistem pendidikan nasional yang sekuler dan birokratis. Meski demikian, secara bertahap pendidikan Islam mengalami transformasi, dari kondisi terisolasi menuju pengakuan terbatas, walaupun tetap berada dalam pengawasan politik dan ideologis. Lembaga-lembaga pendidikan Islam mulai menunjukkan ketahanan dan kemampuan beradaptasi, serta berhasil meletakkan fondasi bagi transformasi yang lebih besar setelah era Reformasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun dihadapkan pada tantangan dan keterbatasan, madrasah, pesantren, dan perguruan tinggi Islam mampu bertahan, berkembang, dan memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan bangsa.

Kata Kunci: Pendidikan, Islam, Orde Baru

ABSTRACT

This study aims to examine the dynamics of changes in Islamic education in Indonesia during the New Order era, especially in the context of its position and recognition in the national education system. Before the New Order, Islamic educational institutions such as Islamic boarding schools and madrasahs were in a marginal position and had not been fully recognized, so that public interest in Islamic education was relatively low. Using a narrative descriptive approach, this study analyzes how the New Order government's policies influenced the growth and development of Islamic educational institutions. During that period, Islamic education developed under tight control and ideological pressure, so that it had to make various concessions to the secular and bureaucratic national education system. However, Islamic education gradually underwent a transformation, from an isolated condition to limited recognition, although it remained under political and ideological supervision. Islamic educational institutions began to show resilience and adaptability, and succeeded in laying the foundation for a greater transformation after the Reformation era. The results of this study indicate that despite facing challenges and limitations, Islamic madrasahs, Islamic boarding schools, and universities were able to survive, develop, and make significant contributions to national development.

Keywords: Education, Islam, New Order

PENDAHULUAN

Secara filosofis, transformasi pendidikan adalah proses pewarisan nilai-nilai kehidupan yang selalu terjadi dalam berbagai situasi dan mencakup pemanfaatan manusia secara keseluruhan melalui pendidikan, yang tidak hanya berfokus pada pembelajaran formal tetapi

juga pembentukan karakter dan nilai moral. (Kosmajadi, 2020) Salah satu nilai yang ada dalam pendidikan karakter adalah nilai religius. Nilai-nilai ini terkait dengan nilai-nilai keagamaan karena mereka berasal dari agama dan akan masuk ke dalam jiwa seseorang. (Jannah, 2023)

Tidak mungkin mengabaikan peran ajaran agama sebagai landasan yang mendalam dan substansial dalam pendidikan Indonesia ketika kita melihat dimensi historisnya. Ajaran agama bukanlah sekadar kumpulan doktrin keagamaan; sebaliknya, ia memainkan peran penting dalam membentuk fondasi moral dan etika bagi siswa. Pendidikan yang mengintegrasikan nilai-nilai agama membentuk pandangan spiritual dan karakter yang tangguh dan bertanggung jawab. Ajaran agama menjadi bagian penting dari pendidikan dan efek positifnya sangat terasa. Nilai-nilai seperti kasih sayang, kejujuran, dan keadilan bukan hanya ide; mereka menjadi dasar moral untuk tindakan siswa dalam kehidupan sehari-hari. (Habsy et al., 2024)

Islam sangat memperhatikan perkembangan moral dan akhlak anak, dan keutamaan manusia dapat dilihat dari moral dan akhlak yang ditunjukkannya. Pentingnya pendidikan Islam dalam membentuk karakter religious. (Jannah, 2023) Ahmad Tafsir mengatakan pendidikan Islam adalah arahan yang diberikan kepada seseorang untuk mencapai pertumbuhan optimal sesuai dengan ajaran Islam. (Drajat, 2020)

Pada awal kepemimpinan Prabowo Subianto, muncul perdebatan tentang RUU TNI yang mengingatkan kembali pada masa Orde Baru, ketika pemerintah memiliki banyak kendali dan membatasi ruang gerak berbagai bagian masyarakat, seperti pendidikan Islam. Pendidikan Islam di masa Orde Baru mengalami dinamika yang rumit. Institusi pendidikan Islam seperti madrasah dan pesantren belum sepenuhnya diakui dan dimasukkan secara resmi ke dalam sistem pendidikan nasional. Hal ini menyebabkan pendidikan terbagi menjadi dua bagian: pendidikan umum, yang didominasi negara, dan pendidikan agama, yang seringkali dianggap sebagai bagian yang berbeda dan kurang mendapat perhatian pemerintah secara keseluruhan.

Pemerintah Orde Baru yang baru saja muncul dan berusaha mengokohkan kekuasaannya juga berusaha mengambil keuntungan dari kegiatan dakwah Islam. Pada tahun 1967, Departemen Agama meluncurkan program yang dikenal sebagai Program Pembinaan Mental Agama Pilot (P3A). Pada dasarnya, program ini dimaksudkan untuk mengadakan pembinaan agama di daerah-daerah yang sebelumnya menjadi basis PKI. Diduga bahwa kekuatan PKI di daerah-daerah ini disebabkan oleh pengaruh agama yang lemah di sana, sehingga untuk menghilangkan sisa-sisa pengaruh PKI, dianggap penting untuk mengadakan pembinaan agama di daerah-daerah semacam itu. (Fahrizal, 2020)

Setiap negara memiliki sistem sosial-politik, yang terdiri dari dua elemen utama: politik dan pendidikan. Meskipun keduanya dianggap sebagai komponen penting dari sistem sosial-politik, politik dan pendidikan seringkali dipandang secara terpisah. Ini jelas tidak benar karena pendidikan dan politik bekerja sama untuk membangun nilai-nilai kewarganegaraan. (Tusadia et al., 2023)

Ketika Orde Baru berkuasa, Kiyai mengalami penurunan peran dalam perpolitikan nasional dan terkesan terpinggirkan, bahkan dari kelompok yang kerap dicurigai gerak geriknya. Namun, hal ini tidak menyurutkan Kiyai untuk tetap mengambil sikap dalam pilihan politiknya. Hal ini terbukti selama kampanye pemilu 1977 ketika Kyai Bisyrri Syamsuri, salah satu kiyai NU dan ketua Majelis Pertimbangan Partai PPP, mengeluarkan "fatwa politik" yang menyatakan bahwa setiap muslim harus memilih PPP. (Rahiman Dani, 2019)

Banyak hal di kehidupan masyarakat Indonesia berubah setelah Orde Baru, termasuk pendidikan. Proses pengelolaan pemerintahan negara mengalami pergeseran ke arah desentralisasi kekuasaan dibandingkan dengan sistem yang lebih sentralistik. Reformasi manajemen yang diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia adalah dasar dari perubahan ini juga. Salah satu konsekuensi logis dari pendidikan adalah undang-undang dan PP (Peraturan Pemerintah) bahwa penyelenggaraan pendidikan harus menyesuaikan diri dengan kehidupan

dan kemandirian. Paradigma berubah di bidang pendidikan sebagai akibat dari perubahan tersebut. Paradigma perencanaan dalam pendidikan akan dipengaruhi oleh transformasi paradigma lama menjadi paradigma baru (Tintingon et al., 2023)

Sejarah pendidikan Islam di era Orde Baru menunjukkan pergeseran dari masa lalu. Dari awal kemerdekaan hingga pemerintah colonial hingga masuknya orde baru, kebijakan pemerintah terkesan meng-"anak tirikan", mengisolasi, bahkan hampir menghapus sistem pendidikan Islam hanya karena "negara bukanlah negara Islam." Terakhir, berkat semangat juang yang luar biasa dari tokoh-tokoh pendidikan Islam, berbagai kebijakan dapat "diredam" untuk tujuan ideal: menciptakan manusia yang beriman, bertaqwa, dan berakhlak mulia. Oleh karena itu, ada banyak faktor sosial, politik, dan religius yang memengaruhi kebijakan pendidikan Islam pemerintah. (Alfarisi & Bakar, 2022)

Selama Orde Baru (1967–1998), pendidikan Islam di Indonesia mengalami transformasi. Berbagai kebijakan yang dibuat oleh pemerintah bertujuan untuk memasukkan pendidikan Islam ke dalam sistem pendidikan nasional. Kebijakan ini muncul sebagai tanggapan atas kebutuhan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan aksesibilitasnya, serta untuk memenuhi keinginan masyarakat Muslim Indonesia. (Yumna, 2018)

Pendidikan Islam di Indonesia mengalami perubahan besar selama Orde Baru. Perubahan ini berdampak pada struktur dan sistem pendidikan negara. Untuk memahami bagaimana pendidikan agama dan identitas Muslim di Indonesia dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah, sangat penting untuk memahami transformasi ini, dan bagaimana kebijakan pemerintah berdampak pada pertumbuhan pendidikan agama.

METODE PENELITIAN

Untuk menjelaskan dinamika institusi pendidikan Islam di Indonesia selama Orde Baru, pendekatan deskriptif naratif dapat digunakan. (Leksono et al., 2013) Menyajikan kisah tentang bagaimana lembaga pendidikan Islam berkembang, serta masalah yang dihadapi selama perkembangan mereka.

Proses pendekatan deskriptif naratif adalah sebagai berikut: Data dikumpulkan melalui penelitian dokumentasi dan kepustakaan, serta dokumen pendidikan, arsip kebijakan pemerintah, dan literatur tentang sejarah pendidikan Islam. Peneliti kemudian menggambarkan secara runtut bagaimana kebijakan pemerintah Orde Baru mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan lembaga pendidikan Islam, seperti pesantren, madrasah, dan sekolah Islam. Peneliti menunjukkan perubahan kebijakan dari waktu ke waktu, seperti pergeseran hubungan antara pemerintah dan lembaga Islam dari antagonistik ke akomodatif.

Peneliti tidak hanya mendeskripsikan peristiwa, tetapi mereka juga mempertimbangkan dinamika hubungan antara pendidikan dan politik dan bagaimana hal itu berdampak pada paradigma pendidikan Islam (formisme, mekanisme, dan organisme). Dalam cerita ini, kita dapat melihat bagaimana kebijakan politik Orde Baru yang otoriter dan developmentalis berkontribusi pada modernisasi pendidikan Islam, yang mencakup penggabungan kurikulum agama dan umum. Hasil analisis disajikan secara naratif untuk menekankan perubahan yang terjadi. Ini mencakup modernisasi kelembagaan, pengakuan madrasah dalam sistem pendidikan nasional, dan peran tokoh-tokoh pembaharu Islam dalam mendorong pendidikan yang lebih kontekstual dan rasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Untuk menjelaskan dinamika institusi pendidikan Islam di Indonesia selama Orde Baru, pendekatan deskriptif naratif dapat digunakan. (Leksono et al., 2013) Menyajikan kisah tentang

bagaimana lembaga pendidikan Islam berkembang, serta masalah yang dihadapi selama perkembangan mereka.

Proses pendekatan deskriptif naratif adalah sebagai berikut: Data dikumpulkan melalui penelitian dokumentasi dan kepustakaan, serta dokumen pendidikan, arsip kebijakan pemerintah, dan literatur tentang sejarah pendidikan Islam. Peneliti kemudian menggambarkan secara runtut bagaimana kebijakan pemerintah Orde Baru mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan lembaga pendidikan Islam, seperti pesantren, madrasah, dan sekolah Islam. Peneliti menunjukkan perubahan kebijakan dari waktu ke waktu, seperti pergeseran hubungan antara pemerintah dan lembaga Islam dari antagonistik ke akomodatif.

Peneliti tidak hanya mendeskripsikan peristiwa, tetapi mereka juga mempertimbangkan dinamika hubungan antara pendidikan dan politik dan bagaimana hal itu berdampak pada paradigma pendidikan Islam (formisme, mekanisme, dan organisme). Dalam cerita ini, kita dapat melihat bagaimana kebijakan politik Orde Baru yang otoriter dan developmentalis berkontribusi pada modernisasi pendidikan Islam, yang mencakup penggabungan kurikulum agama dan umum. Hasil analisis disajikan secara naratif untuk menekankan perubahan yang terjadi. Ini mencakup modernisasi kelembagaan, pengakuan madrasah dalam sistem pendidikan nasional, dan peran tokoh-tokoh pembaharu Islam dalam mendorong pendidikan yang lebih kontekstual dan rasional.

Tabel 1: Transformasi Institusional Pendidikan Islam pada Masa Orde Baru

Lembaga	Perkembangan Pendidikan Islam Dalam Cengkraman Orde Baru
Madrasah	Jumlah dan kualitas madrasah berkembang cukup pesat.
	Pemerintah berusaha agar madrasah memiliki kurikulum umum yang sebanding dengan sekolah umum.
	Madrasah Aliyah sekarang dianggap sebagai jalur pendidikan yang memungkinkan akses ke perguruan tinggi umum.
	Sekolah negeri memiliki fasilitas yang lebih baik, yang menjadi contoh bagi sekolah swasta.
	Meskipun terbatas, pemerintah mulai menawarkan bantuan kepada madrasah yang memenuhi syarat administrasi dan akademik.
	Pelatihan, sertifikasi, dan peningkatan kualitas pendidikan telah dimulai untuk guru madrasah.
	Madrasah Negeri (MTsN dan MAN), yang dikelola langsung oleh Departemen Agama, didirikan oleh pemerintah.
	tetap berfungsi sebagai institusi pendidikan Islam tradisional yang penting.

Pesantren	Pesantren kontemporer muncul pada akhir 1980-an dan 1990-an yang menggabungkan kurikulum agama dengan kurikulum umum. Sejak 1980-an, bantuan dan pengakuan telah meningkat.
	Pemerintah mulai memprioritaskan pesantren dengan memberikan bantuan dan program pengembangan SDM.
	Pesantren Muhammadiyah dan NU juga mulai menerapkan sistem pendidikan madrasah dan sekolah umum di lingkungan pesantren. Salah satu contohnya adalah Pondok Modern Gontor (Ponorogo), yang menjadi pelopor sistem modern berbasis disiplin dan kurikulum formal yang menggabungkan pendidikan agama dan pendidikan umum.
	Pesantren mempertahankan pengajaran kitab klasik, tetapi sistem pendidikannya menjadi lebih terstruktur dan formal.
	Pesantren yang memulai pendidikan formal harus mematuhi aturan kurikulum negara.
	Untuk menghindari peraturan ketat negara, beberapa pesantren tetap memilih untuk beroperasi secara nonformal.
	Pada akhir Orde Baru, pesantren, terutama yang terafiliasi dengan NU, mulai menunjukkan sikap politik yang lebih aktif. Banyak alumni pesantren yang aktif di organisasi Islam dan politik seperti PPP dan PKB setelah Reformasi.
	Banyak pesantren memiliki lembaga formal yang didirikan oleh yayasan mereka.
	Pada era Orde Baru, IAIN berfungsi sebagai pusat perguruan tinggi Islam negeri.
	Setelah Orde Baru berakhir, ada wacana untuk memperluas cakupan keilmuan di IAIN. IAIN awalnya hanya terdiri dari beberapa (seperti IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dll.), tetapi kemudian menjadi lebih banyak di berbagai provinsi.
	metamorfosis ke STAIN dan UIN
	Organisasi Islam seperti Muhammadiyah, NU, Persis, dan Al-Irsyad memimpin pertumbuhannya yang pesat.

Perguruan Tinggi Islam	Sejak 1980-an, modernisasi mulai terjadi. Ini termasuk penggabungan sains sosial, filsafat, ekonomi, dan bahkan sains terapan, serta penggunaan metodologi ilmiah modern dalam penelitian Islam.
	Fakultas baru seperti Fakultas Dakwah, Fakultas Ekonomi Islam, dan Fakultas Syariah dan Hukum telah dibuka.
	lahirnya intelektual Muslim progresif seperti Harun Nasution, Nurcholish Madjid, Abdurrahman Wahid (juga dikenal sebagai Gus Dur), dan Azyumardi Azra pada akhir Orde Baru
	Pemerintah sangat mengontrol narasi ideologis di kampus, termasuk kampus Islam
	Banyak universitas Islam swasta yang tumbuh, seperti Universitas Muhammadiyah, Universitas Islam Indonesia, dan lainnya.

Pembahasan

Agus Salim menggambarkan transformasi sebagai proses menciptakan hal baru melalui penggunaan teknologi dan ilmu pengetahuan. Transformasi juga merupakan perubahan yang mendalam yang mengharuskan orang untuk berpikir dan bertindak dengan cara baru. Tidak terkait dengan masa lalu, ruang lingkup transformasi mengacu pada awal perubahan. Perubahan teknologi menuntut perubahan. (Murwati & Asroriyah, 2020)

Pendidikan didefinisikan secara sederhana sebagai upaya manusia untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi pembawaan mereka secara fisik dan spiritual sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat dan kebudayaan mereka. Budaya dan pendidikan saling menguntungkan satu sama lain. (Rahman et al., 2022)

Konsep pendidikan agama selalu dapat membawa perubahan yang baik, yang dapat menghasilkan peradaban mulia. Sejarah manusia menunjukkan hal ini. Agama selalu ada di masyarakat, baik di masa lalu maupun sekarang. Agama-agama ini jelas muncul sebagai hasil dari kesadaran manusia untuk menganut dan mengamalkannya. (Sulthan, 2021) Pendidikan Islam adalah jenis pendidikan yang disusun, dijalankan, dan diberikan kepada umat Islam, baik di dalam maupun di luar institusi pendidikan. Ada tiga kelompok besar institusi pendidikan Islam yang ada di Indonesia: sekolah Islam dan atau madrasah, pesantren, dan pendidikan nonformal. (Ihsan, 2022)

Pendidikan Islam adalah proses mentransformasi dan internalisasi pengetahuan dan nilai-nilai kepada siswa melalui pengembangan dan pengembangan potensi alami mereka untuk mencapai keselarasan dan kesempurnaan hidup dalam segala aspeknya. Karena Indonesia adalah negara mayoritas beragama Islam, kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan pendidikan, khususnya pendidikan Islam, ditemukan di hampir semua institusi pendidikan di negara ini dan sejarahnya yang beragam, salah satunya di masa orde baru. (Lutfiyana et al., 2021)

Pemerintah Orde Baru harus menyelesaikan sejumlah masalah pendidikan. Ini termasuk memberikan akses yang sama kepada pendidikan, meningkatkan kualitas, efektivitas, dan

efisiensi, dan memastikan bahwa pendidikan terkait dengan program pembangunan nasional. Pemerintah Orde Baru menerapkan sistem sentralistik untuk memastikan pelaksanaan berbagai kebijakan pendidikan berjalan lancar dan tepat sasaran. Dengan sistem ini, pemerintah dapat dengan mudah melacak dan mengawasi proses pendidikan. (Ningrum, 2023) Untuk memajukan pembangunan dan pemerintahan sebuah negara, pendidikan adalah hal yang paling penting. Orde baru sering disebut sebagai orde pembangunan atau masa pembangunan karena pembangunan yang merata di seluruh Indonesia, (Safei & Hudaidah, 2020)

Pemerintah Indonesia mendukung pendidikan Islam dengan berbagai kebijakan dan undang-undang. Misalnya, Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional menetapkan bahwa kebudayaan bangsa dan nilai-nilai Pancasila harus berakar pada pendidikan nasional, termasuk pendidikan agama. (Nurhalimah, 2023)

Upaya untuk menegerikan madrasah di semua tingkat pendidikan adalah arah pendidikan Islam saat ini. Diperkirakan terdapat 123 Ibtidiyah menjadi MIN, 182 Tsanawiyah menjadi MTsN, dan 42 Aliyah menjadi MAN. (Karmiati, 2023) Pemerintah memberlakukan pendidikan agama dari tingkat SD hingga universitas (TAP MPRS No. XXVII/MPRS/1966), madrasah mendapat perlakuan dan status yang sejajar dengan sekolah umum, pondok pesantren mendapat perhatian melalui subsidi dan pembinaan, berdirinya MUI (Majelis Ulama Indonesia) pada tahun 1975, pelarangan SDSB (Sumbangan Dana Sosial Berhadiah) mulai tahun 1993 setelah berjalan sejak awal tahun 1980-an. (Jamal Mustofa, 2020)

Penciptaan Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 1975–1998, didirikan dengan tujuan untuk berfungsi sebagai wadah keislaman, menunjukkan peran Islam dalam pemerintahan orde baru. Pembentukan Majelis Ulama Indonesia (MUI) membantu pemerintahan modern dalam menghentikan konflik di antara kelompok dan menciptakan keharmonisan dan kerjasama di antara seluruh umat Islam di Indonesia. Upaya pemerintah ini menunjukkan bahwa pemahaman agama Islam meningkat dan hubungan antara kemajemukan di masyarakat menjadi lebih baik. Tidak perlu di tanyakan lagi bahwa keberadaan Islam di Indonesia sangat memberikan pengaruh dan kontribusi dalam perjalanan bangsa Indonesia yang telah melalui segala perkembangan dan perubahan mengikuti pergerakan zaman salah satunya Islam di masa orde baru. (Karmiati, 2023)

Sejak kemerdekaan, terjadi perdebatan tentang legalitas pelaksanaan pendidikan agama. Mereka yang mendukung pendidikan agama menganggapnya penting untuk diberikan di sekolah dan perguruan tinggi, sedangkan mereka yang menentang menganggapnya tidak penting dan dapat diganti dengan pendidikan moral. (Hasdiana et al., 2024)

Pendidikan Islam di Indonesia selama Orde Baru dari tahun 1966 hingga 1998, Ordo ini berlangsung selama kurang lebih tiga puluh dua tahun. (Hasdiana et al., 2024) Selama pemerintahan Orde Baru, politik sentralistik mendominasi pendidikan, dengan fokus pada pertumbuhan ekonomi yang didukung oleh stabilitas politik dan keamanan yang didukung oleh konglomerat, angkatan bersenjata, dan birokrasi pemerintah. Selama pemerintahan Orde Baru Presiden Soeharto, elit politik yang berkuasa sangat memperhatikan masalah pendidikan nasional. (Jailani & Muhammad, 2019)

Kebijakan pendidikan Orde Baru sangat sentralistik dan terpusat. Pengambilan keputusan, penyusunan kurikulum, dan alokasi anggaran pendidikan dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pemerintah. Tujuannya adalah untuk menjamin bahwa pendidikan di seluruh Indonesia seragam, dan untuk mengawasi konten kurikulum dan pesan yang disampaikan kepada siswa. (Fathiya et al., 2024)

Dalam sambutan presiden Soeharto mengenai Gerakan Wajib Belajar yang bertepatan dengan hari Pendidikan Nasional, beliau mengatakan bahwa dasar- dasar pendidikan nasional ialah kecerdasan fikiran, keluhuran budi pekerti, dan semangat kebangsaan. Dengan Gerakan Wajib Belajar ini bangsa Indonesia membuat langkah yang penting untuk mewujudkan amanat

Pembukaan Undang-Undang Dasar, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dalam alam kemerdekaan. (Cahyaningsih, 2016)

Program wajib belajar meningkatkan akses ke pendidikan, yang merupakan salah satu pencapaian utama kebijakan pendidikan Orde Baru. Kebijakan ini berhasil menurunkan tingkat buta huruf dan meningkatkan partisipasi siswa dalam pendidikan dasar. Program seperti pembangunan Sekolah Dasar Inpres dan pengenalan wajib belajar 6 tahun menjadi langkah penting untuk memastikan semua anak mendapatkan pendidikan dasar. (Loppies, 2023) Selama era Orde Baru, infrastruktur madrasah dan pesantren diperbarui, meningkatkan akses ke pendidikan Islam di berbagai tempat. (Hidayati, 2018)

Adanya Inpres 15/1974 dan Kepres 34/1972 selama pemerintahan Orde Baru menunjukkan respons kuat dari komunitas muslim. Dengan demikian, pemerintah Orde Baru mengambil tindakan dengan menetapkan kebijakan untuk madrasah untuk memastikan bahwa madrasah memiliki kualitas yang baik. Pada tanggal 24 Maret 1975, kebijakan ini kemudian menjadi Surat Keputusan Bersama yang ditandatangani oleh tiga atau lebih menteri. (Anjasari, 2022)

Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri tahun 1975 menetapkan bahwa kualitas madrasah harus ditingkatkan. Ini dibuat dengan persetujuan tiga menteri: Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan Menteri Dalam Negeri. Ada kemungkinan bahwa kehadiran kebijakan ini disebabkan oleh ketidakadilan yang dirasakan terhadap pemerintah Indonesia secara keseluruhan terhadap lembaga pendidikan Islam, khususnya madrasah dan lulusan mereka. Dengan demikian, kemajuan ini membawa angin segar untuk kemajuan pendidikan agama karena pendidikan madrasah diakui setara dengan pendidikan umum. (Ramadhan & Hartati, 2023)

Salah satu strategi kebudayaan yang digunakan oleh Orde Baru adalah menggabungkan bagian-bagian masyarakat yang berbeda ke dalam satu kesatuan (atau, secara negatif, mengucilkannya). Oleh karena itu, SKB adalah kemenangan Departemen Agama sebagai bagian dari pemerintah. Ini menunjukkan bahwa semakin banyak masyarakat muslim yang masuk ke dalam masyarakat nasional, SKB ini juga akan menjadi alat kontrol untuk memperkuat dominasi mereka. Selain itu, perlu diingat bahwa SKB itu diikuti oleh undang-undang yang ternyata mendorong ribuan madrasah untuk menerima bantuan rehabilitasi gedung dari pemerintah. belum lagi dengan subsidi yang diberikan kepada madrasah dan penegeriannya setelah itu. Kenyataannya, banyak pesantren yang kemudian mendirikan madrasah atau bahkan sekolah-sekolah umum karena didorong oleh langkah-langkah pemerintah. (Hanipudin, 2019)

Kebijakan ini juga didasarkan pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri tahun 1975, yang menekankan betapa pentingnya pendidikan agama menjadi bagian dari kurikulum sekolah. (Nirwana & Khoiri, 2023) Pemerintah mengambil kebijakan yang lebih operasional untuk madrasah, termasuk pembinaan mutu pendidikan. Pada tanggal 24 Maret 1975, Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri, yang ditandatangani oleh Menteri Agama (Prof. Dr. Mukti Ali), Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Letjen. TNI Dr. Teuku Syarif Thayeb), dan Menteri Dalam Negeri (Jend. TNI Dr. Teuku Syarif Thayeb), dikeluarkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan madrasah. (Kamaruddin et al., 2023)

Poin-Poin Penting dari SKB 3 Menteri 1975:

1. Materi agama sekurang-kurangnya 30% dari materi umum, Di Madrasah Aliyah, program pilihan A1 "Ilmu-Ilmu Agama" tidak menerapkan kurikulum ini. Namun, mata pelajaran agama dan umum memiliki prosentase berimbang 198 persen, dengan 47% dan 53% masing-masing di semester I dan II, 55% dan 45% masing-masing di semester III dan IV, dan 65% dan 35% masing-masing di semester IV dan V. (Ramadhan & Hartati, 2023)

2. Di sekolah umum dan madrasah, banyak pelajaran umum dan nilai ijazah sama, Membantu pendidikan madrasah mencakup kurikulum, buku ajar, perangkat pendidikan, sarana pendidikan, dan instructor,
3. Menteri Agama bertanggung jawab atas madrasah,
4. Menteri Agama, bersama dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, membangun dan mengawasi mutu madrasah di seluruh negeri.
5. Pemerintah menyediakan alat pembelajaran untuk meningkatkan kualitas.(Ramadhan & Hartati, 2023)
6. Siswa yang telah menyelesaikan sekolah menengah dapat berpindah ke sekolah umum yang setingkat, dan lulusan sekolah menengah dapat melanjutkan ke sekolah umum yang lebih tinggi.(Alfarisi & Bakar, 2022)

Dampak Negatif SKB:

1. Kurangnya keinginan Madrasah dan Pesantren untuk meningkatkan pendidikan agama karena biasanya sudah dipengaruhi oleh bidang studi yang diujikan nasionalkan.
2. IAIN masih kekurangan waktu untuk mendapatkan input tentang penguasaan kitab kuning.
3. Belum semua Madrasah memiliki gedung atau lokasi sendiri (masih menumpang), dan belum semua Madrasah memiliki guru bidang studi (umum).
4. Jumlah guru madrasah masih sangat rendah dibandingkan dengan sekolah umum (30% dari kebutuhan yang sebenarnya).(Alfarisi & Bakar, 2022)

Ditandai oleh sejumlah kebijakan yang bertujuan untuk memasukkan pendidikan agama ke dalam kurikulum pendidikan nasional.(Yuningsih, 2015) termasuk menetapkan pendidikan agama Islam sebagai mata pelajaran wajib dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Ini meningkatkan pengakuan institusi pendidikan Islam seperti madrasah dan pesantren.(Widdah, 2024)

Seperti P4 Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila ditetapkan sebagai program yang harus diikuti oleh siswa dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Program ini bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam benak generasi muda sehingga mereka memahami dan mengamalkan ideologi negara dalam kehidupan sehari-hari.(Jailani & Muhammad, 2019) Kebijakan pendidikan masa orde baru sangat sentralistik dan menyeragamkan kurikulum dan penilaian hasil belajar sesuai dengan keputusan pemerintah pusat. Akibatnya, banyak sekolah masih menerapkan kebijakan yang sudah ada pada masa orde baru.(Priarni et al., 2022)

Kurikulum Pendidikan Islam di Indonesia dimaksudkan untuk membantu siswa memahami dan menerapkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan mereka. Kurikulum ini tidak hanya mencakup materi agama tetapi juga mencakup seluruh aspek pendidikan, mulai dari akidah, ibadah, hingga akhlak.(Nirwana & Khoiri, 2023) Kurikulum pendidikan termasuk dalam kebijakan pendidikan yang telah ditetapkan. Kurikulum pendidikan dapat dilihat sebagai cerminan dari cita-cita pendidikan secara keseluruhan. Kurikulum pendidikan Indonesia juga mengalami revisi secara berkala. Setiap perubahan tidak dapat dipisahkan dari pendekatan alternatif untuk belajar.(Tintigon et al., 2023)

Kurikulum Orde Lama dimasukkan ke dalam kurikulum Orde Baru, mempengaruhi berbagai aspek pendidikan masyarakat. Kurikulum pembelajaran agama Islam tahun 1968, 1975, dan modifikasi tahun 1984, 1994, dan 1999 adalah beberapa contoh penyesuaian yang dilakukan pada masa Orde Baru. Kurikulum ini kemudian digabungkan dengan sistem pendidikan nasional sekarang menjadi satu pak.(Nirwana & Khoiri, 2023)

Kurikulum 1968, siswa hanya bertindak sebagai individu yang masif dengan menghafal teori-teori yang ada tetapi tidak menerapkannya. Kurikulum ini tidak menekankan aspek afektif

dan psikomotorik. Dengan kata lain, itu hanya berfokus pada membangun siswa dari segi intelektual.(Datumula, 2021)

Kurikulum Pendidikan Agama dan Umum 1975: Kurikulum sentralistik bertujuan untuk memastikan bahwa pendidikan berjalan dengan efektif dan efisien. Namun, kurikulum tahun 1975 ini mendapat banyak kritik di lapangan karena guru hanya sibuk menulis tujuan spesifik untuk setiap pelajaran.(Anitasari & Cahyono, 2023)

Pengembangan "Kurikulum 1984", yang diatur oleh Keputusan Menteri Agama, adalah langkah penting. Kurikulum ini dirancang untuk mengintegrasikan pendidikan agama dengan pendidikan umum, dengan sepertiga pelajaran di madrasah terdiri dari pelajaran agama dan dua pertiga pelajaran umum, dengan tujuan meningkatkan kualitas lulusan madrasah agar setara dengan lulusan sekolah umum.(Widdah, 2024)

Kurikulum 1994 Pendekatan Berbasis Kompetensi: Kurikulum ini mulai menggunakan pendekatan berbasis kompetensi yang lebih modern, tetapi tetap mempertahankan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan pendidikan.(Safitri & Purwaningsih, 2016) (Anitasari & Cahyono, 2023)

Di tahun 1968, 1975, dan 1984, kurikulum dirancang untuk menekankan pembentukan karakter bangsa dan pendidikan nasionalistik. Misalnya, pendidikan moral Pancasila (PMP) menjadi mata pelajaran wajib di sekolah untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila.(Idris & Tolla, 2024) Pada era orde baru, kurikulum diubah enam kali. Ini termasuk kurikulum Proyek Pengembangan Sekolah Perintis (PPSP) pada tahun 1973, kurikulum 1975, kurikulum 1984, kurikulum 1994, dan kurikulum 1997.(Muhammedi, 2013)

Selain perubahan kurikulum, reformasi pendidikan guru dilakukan dengan meningkatkan kualifikasi lulusan guru menjadi D-II. Dalam praktiknya, kebijakan tersebut baru diimplementasikan pada 1989-1990 melalui peningkatan kualifikasi pendidikan guru SD berdasarkan Surat Keputusan nomor 0854/U/1989 tanggal 30 Desember 1989. Kualifikasi guru SD awalnya dapat diisi oleh lulusan SPG, SGO, dan PGA, namun dengan adanya reformasi pendidikan guru, maka kualifikasi tersebut kemudian meningkat, di mana untuk menjadi seorang guru SD harus menamatkan pendidikannya di tingkat D-II.(Ningrum, 2023)

Kebijakan pendidikan Islam di era Orde Baru tidak hanya menekankan pengajaran agama, tetapi juga memasukkan ideologi negara, Pancasila, ke dalam kurikulum. Untuk membantu siswa menginternalisasi prinsip-prinsip Pancasila dalam kehidupan sehari-hari mereka, pemerintah mewajibkan Pendidikan Moral Pancasila (PMP) menjadi komponen utama dari kurikulum agama.(Safei & Hudaidah, 2020)

Kebijakan politik otoriter dan penekanan pada oposisi politik adalah ciri kepemimpinan Soeharto.(Chusata, 2024) Pemerintah menerapkan pengawasan ketat terhadap materi ajar dan aktivitas di lembaga pendidikan Islam untuk memastikan kesesuaian dengan ideologi Pancasila(Widdah, 2024) seperti penunjukan direktur sekolah yang setia pada rezim, Buku teks dan materi pelajaran yang digunakan di institusi pendidikan Islam sering kali dihilangkan karena dianggap bertentangan dengan ideologi nasional.(Wahyudin & Akbar, 2024) mengakibatkan kurangnya kebebasan akademik baik untuk pendidik maupun siswa.(Yuningsih, 2015)

Pada masa Orde Baru, pemerintah membantu pesantren melalui Proyek Pembangunan Lima Tahun, juga dikenal sebagai Pelita. Pemerintahan terkait, baik pemerintahan pusat maupun daerah, memberikan dana untuk pembinaan pesantren. Gagasan untuk membangun pondok pesantren dengan model baru muncul pada tahun 1975. Lahirlah Pondok Pesantren Pembangunan, Pondok Modern, dan Pondok Karya Pembangunan. Setelah itu, banyak pesantren membuka sekolah umum dengan kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah.(Jailani & Muhammad, 2019)

Pemerintah mulai bersikap lebih akomodatif terhadap umat Islam dari pertengahan hingga akhir Orde Baru. Perubahan ini didorong oleh beberapa faktor, termasuk reaksi keras dan tekanan masyarakat Islam terhadap kebijakan yang dianggap merugikan serta perubahan perspektif masyarakat Islam, yang mulai menerima Pancasila sebagai asas tunggal negara. Pemerintah kemudian mengadopsi kebijakan yang lebih menguntungkan umat Islam. Ini termasuk pengakuan dan fasilitasi lembaga pendidikan Islam seperti madrasah dan pesantren, pengesahan Undang-Undang Pendidikan Nasional tahun 1989 yang mencakup pendidikan agama, penghapusan larangan pakaian muslimah di sekolah, dan pembentukan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI). (Jailani & Muhammad, 2019) (Zainul Fuad, Nandani Zahara Mahfuzah, 2024) (Johansyah, 2018) Pemerintah mengeluarkan Surat Keputusan No. 100 pada tahun 1991 yang memungkinkan siswi Muslim mengenakan jilbab sebagai bagian dari seragam sekolah mereka. (Alatas, 2021)

Banyak siswi Muslim merasa lebih nyaman menjalankan tugas agama mereka dengan jilbab setelah diizinkan. Ini juga meningkatkan kesadaran akan pentingnya pendidikan agama dalam kehidupan sehari-hari. Perubahan kebijakan ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk memperbaiki hubungannya dengan umat Islam setelah sebelumnya sempat tegang karena kebijakan represif yang berbeda. (Dahlan, 2018)

Kebijakan pemerintah orde baru tentang pendidikan islam di madrasah di Indonesia, terutama selama dua dekade terakhir 1980-an hingga 1990-an, dipandang positif dan menguntungkan. Namun, kebijakan saat ini tidak berarti sempurna atau tidak memiliki efek negatif. (Hasdiana et al., 2024)

Selama Orde Baru, fokusnya adalah homogenisasi dan kontrol ideologis untuk menjaga kesetiaan negara dan mencegah radikalisisasi. Sebaliknya, era Reformasi lebih inklusif dan pluralistik, memungkinkan berbagai pandangan dalam pendidikan Islam dan lebih menghargai keberagaman. (Wahyudin & Akbar, 2024)

Dalam hal liburan sekolah selama bulan Ramadhan, Mendikbud (Menteri Pendidikan dan Kebudayaan) Daoed Joesoef mengeluarkan kebijakan pada tahun 1978, yang disampaikan melalui SK (Surat Keputusan) No. 0211/U/1978. Kebijakan tersebut menetapkan bahwa siswa dari tingkat SD (Sekolah Dasar) hingga SLTA (Sekolah Lanjutan Tingkat Atas) tidak diberi libur selama sebulan penuh selama bulan Ramadhan. meskipun bertentangan dengan MUI yang dipimpin oleh Buya Hamka. (Fauziah, 2019)

Dalam posisinya sebagai ketua kementerian agama, Mukti Ali berusaha untuk memodernisasi institusi pendidikan Islam, termasuk pesantren, dengan meluncurkan program pelatihan dan pembinaan yang membantu manajemen lembaga pendidikan. Ia memastikan bahwa pesantren tetap independen sambil memastikan manajemen dan pengembangan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. (Idris & Tolla, 2024)

Mukti Ali tidak hanya berfokus pada pendidikan agama, tetapi dia juga mendukung pengembangan pendidikan vokasional untuk menyiapkan tenaga kerja yang terampil. Ia menawarkan gagasan "pembangunan manusia seutuhnya", yang menekankan betapa pentingnya iman untuk pembangunan masyarakat. (Idris & Tolla, 2024)

Berdasarkan keuntungan dari kebijakan yang telah ada, beberapa Pekerjaan Rumah (PR) masih perlu dievaluasi oleh pemerintah. Beberapa PR tersebut adalah sebagai berikut: pertama, lulusan madrasah masih belum memenuhi syarat untuk masuk dan mendaftar di pekerjaan dan institusi binaan pemerintah tertentu. kedua, masih ada kendala dan kesulitan mendapatkan izin untuk mendirikan dan menyumbangkan dana ke lembaga pendidikan nuansa Islam seperti rumah tahfiz. Serta ketiga, pemerintah belum memperhatikan kesejahteraan guru dan pendidik di madrasah. (Ramadhan & Hartati, 2023)

KESIMPULAN

Perkembangan pendidikan Islam di masa Orde Baru berlangsung dalam lingkungan politik yang otoriter dan penuh kendali negara. Akibat kebijakan yang cenderung sekuler dan curiga terhadap Islam politik, pendidikan Islam pada awalnya berada di posisi marginal. Namun, pemerintah mulai membuka ruang bagi pendidikan Islam untuk berkembang lebih luas seiring dengan meningkatnya kesadaran politik umat Islam. Di bawah Orde Baru, pendidikan Islam berkembang dalam batas dan kontrol. Namun, di situlah terbentuk fondasi kuat untuk transformasi pendidikan Islam setelah Reformasi. Madrasah, pesantren, dan perguruan tinggi Islam berhasil bertahan, berubah, dan mulai berkontribusi secara signifikan pada pembangunan bangsa.

Pendidikan Islam, khususnya madrasah dan pesantren, awalnya diposisikan sebagai pendidikan kelas dua. Sistem pendidikan nasional bersifat dualistik (umum vs agama), dan pendidikan Islam tidak mendapatkan alokasi sumber daya yang setara. Melalui kebijakan seperti SKB Tiga Menteri (1975) dan UU Sisdiknas No. 2 Tahun 1989, madrasah mulai diakui setara dengan sekolah umum. Kurikulum diselaraskan, dan lulusan madrasah dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan umum. Pesantren mengalami transformasi dari lembaga tradisional menjadi pusat pendidikan yang lebih terbuka, dengan memasukkan pelajaran umum, keterampilan, dan bahkan membuka lembaga formal seperti madrasah dan sekolah. Pendidikan Islam memainkan peran penting dalam menghasilkan generasi Muslim yang masuk ke kelas menengah baru. Kelas menengah baru inilah yang kemudian menjadi agen perubahan selama era Reformasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Alatas, A. (2021). *Di balik larangan jilbab di sekolah-sekolah negeri Indonesia*. Idea Publishing.
- Alfarisi, S., & Bakar, Y. A. (2022). SKB 3 menteri dan implikasinya pada pendidikan Islam. *Al-Fikr: Jurnal Pendidikan Islam*, 8(1), 1–9. <https://doi.org/10.32489/alfikr.v8i1.286>
- Anitasari, L., & Cahyono, A. (2023). Kurikulum dan pola ilmu pengetahuan pada masa Orde Lama dan Orde Baru. *Social Science Academic*, 1(2), 93–98. <https://doi.org/10.37680/ssa.v1i2.3390>
- Anjasari, T. (2022). Kebijakan pendidikan Islam di era Orde Lama dan Orde Baru. *Jurnal Studi Islam Dan Kemuhmadiyah*, 2(2), 141–155. <https://doi.org/10.18196/jasika.v2i2.34>
- Cahyaningsih, G. D. (2016). Latar belakang wajib belajar masa Orde Baru tahun 1984. *AVATARA, e-Journal Pendidikan Sejarah*, 4(3), 979–989.
- Chusata, R. Y. (2024). Dampak kebijakan pemerintahan Orde Baru dan perubahan sosial terhadap perkembangan pendidikan anak tahanan G30S di Pulau Buru 1969-1976. *LANCAH: Jurnal Inovasi Dan Tren*, 2(1), 148–154. <http://www.journal.lembagakita.org/index.php/ljit/article/view/2248>
- Dahlan, Z. (2018). Kebijakan pemerintah Orde Baru terhadap Majelis Ta'lim. 1, 123–152.
- Dani, R. (2019). Reposisi kiyai pesantren dalam dinamika politik. *Sustainability (Switzerland)*, 11(1), 1–14.
- Datumula, S. (2021). Peraturan kebijakan pendidikan di Indonesia pada masa Orde Lama, Orde Baru, Reformasi, dan Kabinet Kerja. *Moderasi: Jurnal Studi Ilmu Pengetahuan Sosial*, 1(2), 56–78. <https://doi.org/10.24239/moderasi.vol1.iss2.27>
- Drajat, M. (2020). Re-orientasi kurikulum pendidikan Islam. *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 3(2), 172–185. https://al-afkar.com/index.php/Afkar_Journal/article/view/130

- Fahrizal, A. (2020). Islamisasi di Kota Surakarta dan sekitarnya masa Orde Baru: Sebuah tinjauan awal. *Lembaran Sejarah*, 16(1), 62. <https://doi.org/10.22146/lembaran-sejarah.59913>
- Fathiya, S., et al. (2024). Transformasi dan pengaruh kebijakan pendidikan pada masa Orde Baru di Indonesia. *Dewaruci: Jurnal Studi Sejarah Dan Pengajarannya*, 3(1).
- Fauziah, A. (2019). Muhammadiyah masa Orde Baru: Sikap politik Muhammadiyah terhadap kebijakan pemerintah Orde Baru tahun 1968-1989. 1–23.
- Fuad, Z., et al. (2024). Dinamika politik hukum Islam era Orde Baru. *Sultan Adam : Jurnal Hukum Dan Sosial*, 2(1), 42–53. <http://qjurnal.my.id/index.php/sultanadam/article/view/711>
- Habsy, B. A., et al. (2024). Landasan historis pendidikan Indonesia: Dari masa penjajahan sampai kemerdekaan. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(1), 4672–4685.
- Hanipudin, S. (2019). Pendidikan Islam di Indonesia dari masa ke masa. *Matan : Journal of Islam and Muslim Society*, 1(1), 39. <https://doi.org/10.20884/1.matan.2019.1.1.2037>
- Hasdiana, S., et al. (2024). Kebijakan pendidikan pemerintah Indonesia era Orde Baru serta pengaruhnya terhadap pendidikan Islam di Indonesia. 2(4).
- Hidayati, N. (2018). Pergeseran kebijakan.... *Ta'dib*, 16(2), 20–41.
- Huda, M. (2022). Kebijakan pendidikan Islam di masa Orde Baru dalam mengatasi krisis ulama: Kajian historis lahirnya MAPK. *Kuttab*, 6(2), 234. <https://doi.org/10.30736/ktb.v6i2.1143>
- Idris, M., & Tolla, I. (2024). Evolusi sistem pendidikan di Indonesia: Sejarah dan perkembangan pendidikan di Indonesia. 8(2), 1494–1505.
- Ihsan. (2022). *Pendidikan moderasi beragama model madrasah pesantren* (A. Hidayat, Ed.).
- Jailani, M. S., & Muhammad, M. (2019). Kilas balik kebijakan pendidikan Islam Indonesia pada masa Orde Baru (1967-1997). 19(1), 15–26.
- Jannah, A. (2023). Peran pendidikan agama Islam dalam membina karakter religius siswa sekolah dasar. *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(1), 1–19.
- Johansyah. (2018). Membaca Islam Indonesia di masa Orde Baru. *Sultan Adam*, 3(2), 91–102. <http://qjurnal.my.id/index.php/sultanadam/article/view/711>
- Kamaruddin, I., et al. (2023). [Title missing]. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran*, 6(4), 2675–2680.
- Karmiati, L. (2023). Analisis Islam pada masa Orde Baru tahun 1966-1998. *Tanjak: Sejarah Dan Peradaban Islam*, 3(1), 77–85. <https://doi.org/10.19109/tanjak.v3i1.18183>
- Kosmajadi, E. (2020). Transformasi pendidikan: Suatu tinjauan filosofis. *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan*, 1–5.
- Leksono, S. (2013). *Pendekatan deskriptif*.
- Loppies, M. (2023). Pendidikan zaman Orde Baru: Upaya melanggengkan kekuasaan Soeharto. 6(2).
- Lutfiyana, I., et al. (2021). Tinjauan histori terhadap permasalahan pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional. *AtTàlim : Jurnal Pendidikan*, 7(2).
- Muhammedi. (2013). Perubahan kurikulum di Indonesia: Studi kritis tentang upaya menemukan kurikulum pendidikan Islam yang ideal. 49–70.
- Murwati, S. R., & Asroriyah, N. (2020). Studi exploratif, transformasi pendidikan dalam menghadapi pandemi Corona Virus Disease (COVID-19). *JPT: Jurnal Pendidikan Tematik*, 1(3), 166–171. <https://siducat.org/index.php/jpt/article/view/122>
- Mustofa, J. (2020). Quo vadis pondok pesantren di era undang-undang pesantren. 1(1), 1–17.

- Ningrum, S. U. D. (2023). Kebijakan pemerintah Orde Baru dalam meningkatkan kompetensi guru di Indonesia. *Lembaran Sejarah*, 19(1), 58. <https://doi.org/10.22146/lembaran-sejarah.86451>
- Nirwana, R., & Khoiri, Q. (2023). Kebijakan kurikulum pendidikan Islam pada satuan pendidikan dasar, menengah dan tinggi. 05(02), 5266–5278.
- Nurhalimah. (2023). Sistem pendidikan Islam di Madrasah Muhammad Basiuni Imran Sambas. 388–420.
- Priarni, R., et al. (2022). Kebijakan pendidikan Islam masa Orde Lama hingga Orde Baru; Perspektif sejarah pendidikan Islam dan implikasinya pada pendidikan Islam era reformasi di Indonesia. *An-Nafah : Jurnal Pendidikan Dan Keislaman*, 2(2), 100–109.
- Rahman, A., et al. (2022). Pengertian pendidikan, ilmu pendidikan dan unsur-unsur pendidikan. *Al Urwatul Wutsqa: Kajian Pendidikan Islam*, 2(1), 1–8.
- Ramadhan, S. A., & Hartati, Z. (2023). Analisis kebijakan pendidikan Islam dan implikasinya bagi madrasah dulu-sekarang (SKB 3 Menteri tahun 1975, UUSPN No. 2 tahun 1989 dan UU. No. 16 tahun 2001). *Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Kearifan Lokal (JIPKL)*, 3(4), 194–205. <https://jipkl.com/index.php/JIPKL/article/view/33/59>
- Safei, S., & Hudaidah, H. (2020). Sistem pendidikan umum pada masa Orde Baru (1968-1998). *Jurnal Humanitas: Katalisator Perubahan Dan Inovator Pendidikan*, 7(1), 1–13. <https://doi.org/10.29408/jhm.v7i1.3253>
- Safitri, R., & Purwaningsih, S. (2016). Kurikulum nasional mata pelajaran sejarah masa Orde Baru tahun 1968- 1998. *AVATARA, e-Journal Pendidikan Sejarah*, 4(3), 644.
- Sulthan, D. A. (2021). Konsep pendidikan agama pada zaman milenial. 3, 216–235.
- Tintongon, J. Y., et al. (2023). Problematika dan perubahan kebijakan pendidikan di Indonesia. *Jurnal Educatio FKIP UNMA*, 9(2), 798–809. <https://doi.org/10.31949/educatio.v9i2.5088>
- Tusadia, A., et al. (2023). Relasi pendidikan Islam, politik dan kekuasaan. *Journal on Education*, 05(02), 4796–4804.
- Wahyudin, A., & Akbar, F. (2024). Kontestasi kebijakan pendidikan Islam di era Orde Baru dan Reformasi. 2(1), 47–57.
- Widdah, M. E. (2024). Kebijakan pendidikan di masa Orde Baru. 4, 3853–3864.
- Yumna, Y. (2018). Perkembangan pendidikan Islam masa Orde Baru pada sekolah aliyah dan perguruan tinggi Islam (IAIN dan STAIN). *Mau'izhah*, 8(2), 161. <https://doi.org/10.55936/mauizhah.v8i2.9>
- Yuningsih, H. (2015). Kebijakan pendidikan Islam masa Orde Baru. 175–194.